

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan pengelolaan sampah merupakan sesuatu yang tidak asing lagi bagi setiap wilayah di dunia tidak terkecuali Indonesia. Hampir di seluruh aspek kehidupan manusia menghasilkan sampah. Setiap waktu jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Saat ini telah terdapat banyak sistem pengelolaan sampah namun pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan pengelolaan sampah tidak akan pernah dapat diselesaikan jika hanya bertumpu pada pemerintah saja tanpa ada keterlibatan dari masyarakat sebagai sumber penghasil sampah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diketahui bahwa permasalahan sampah mencakup banyak aspek, oleh karena itu perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu sangat diperlukan inovasi-inovasi baru yang lebih memadai ditinjau dari segala aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial maupun aspek teknis dari hulu sampai ke hilir. Inovasi-inovasi baru tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Kabupaten Dharmasraya adalah salah satu kabupaten di Sumatera Barat, Indonesia dengan luas wilayah 302.599 Ha dan jumlah penduduk 229.313 jiwa dengan administrasi pemerintahan yang meliputi 11 (sebelas) kecamatan. Sektor persampahan di Kabupaten Dharmasraya memiliki keunggulan dan kelemahan, baik itu ditinjau dari segi internal maupun ditinjau dari segi eksternal. Keunggulan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya yaitu dari aspek kelembagaan, dimana saat ini telah tersedia organisasi dan regulasi pengelolaan persampahan yaitu Peraturan Daerah No.9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Persampahan dan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2011 tentang Retribusi Sampah. Namun masih terdapat banyak kelemahan atau kendala dalam pengelolaan

persampahan di Kabupaten Dharmasraya baik dalam aspek teknis maupun non teknis.

Salah satu kendala pengelolaan sampah pada Kabupaten Dharmasraya adalah sarana dan prasarana pengelolaan sampah saat ini sudah banyak yang rusak atau melewati umur pakai sehingga jumlahnya tidak cukup untuk melayani kegiatan persampahan. Persentase tingkat pelayanan sampah berdasarkan jumlah timbulan sampah yang diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) saat ini kurang lebih 2,3%. Daerah terlayani berdasarkan sampah terangkut ke TPA hanya tiga kecamatan, sedangkan delapan kecamatan lainnya masih mengolah sampahnya sendiri yaitu sebesar 97% sampah tidak terkelola dimana sebagian dibakar atau dibuang ke sungai.

Saat ini, mayoritas masyarakat Kabupaten Dharmasraya masih banyak yang belum menerapkan konsep 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) yaitu pengurangan, pemakaian ulang dan daur ulang sampah. Hal tersebut dikarenakan kurang optimalnya pemerintah Kabupaten Dharmasraya dan *stakeholder* lainnya dalam mengimplementasikan setiap kebijakan dan strategi terkait pengurangan dan penanganan sampah. Permasalahan lainnya antara lain pengumpulan dan pengangkutan sampah yang tidak efisien. Kabupaten Dharmasraya memiliki bank sampah yang berjumlah 3 unit namun saat ini bangunan pengolahan tersebut belum berfungsi dengan baik. TPA yang ada masih menerapkan sistem *open dumping* dengan keterbatasan alat berat dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola TPA.

Meninjau kekuatan dan kelemahan pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan persampahan yang ideal yang dapat diwujudkan dengan adanya suatu perencanaan umum atau strategi yang diharapkan menjadi acuan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya No. 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang atau badan dalam pengelolaan sampah wajib mengelola sampah dengan prinsip mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang yang disebut 3R. Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor 03/PRT/M/2013,

perencanaan umum penyelenggaraan pengelolaan sampah untuk kota sedang dan kecil dalam bentuk Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP) berbasis 3R, yang memuat aspek teknis operasional yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan TPA dengan aspek non teknis berupa aspek kelembagaan, pembiayaan, peraturan/ legalitas dan aspek peran serta masyarakat. PTMP diharapkan dapat diterapkan dengan baik sehingga mampu mengurangi permasalahan-permasalahan sampah di Kabupaten Dharmasraya.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud dari tugas akhir ini adalah untuk membuat perencanaan teknis dan manajemen persampahan Kabupaten Dharmasraya berbasis 3R yang dimulai dari tahun 2017-2031.

1.2.2 Tujuan Perencanaan

Tujuan dari tugas akhir ini antara lain adalah:

1. Mengevaluasi sistem pengelolaan persampahan yang sudah ada di Kabupaten Dharmasraya;
2. Mengembangkan aspek teknis dan aspek non teknis pengelolaan sampah;
3. Merencanakan pengembangan daerah dan tingkat pelayanan serta target 3R di Kabupaten Dharmasraya untuk jangka pendek, menengah dan panjang;
4. Menghitung anggaran biaya untuk program dan kegiatan untuk lima tahun pertama (jangka pendek).

1.3 Manfaat Perencanaan

Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai dasar atau acuan bagi peneliti yang berminat untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengelolaan persampahan;
2. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan yang berguna bagi pemerintah Kabupaten Dharmasraya khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebagai pengelola persampahan dan penentuan kebijakan yang berkaitan dengan mengatasi masalah persampahan untuk masa-masa mendatang;

3. Memberikan pengetahuan mengenai pengelolaan persampahan kepada masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam meningkatkan partisipasinya pada pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis 3R.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada tugas akhir ini adalah:

1. Analisis data dasar perencanaan yang terdiri dari studi timbulan dan komposisi sampah dan data sekunder yang didapat dari konsultan perencanaan Satuan Kerja (Satker) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Evaluasi sistem pengelolaan sampah yang telah ada berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-2454:2002 tentang Spesifikasi Timbulan Sampah Untuk Kota Kecil dan Sedang di Indonesia, SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum (Permen PU) No. 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
3. Perencanaan pengembangan pengelolaan persampahan yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dharmasraya;
4. Perencanaan lokasi pengembangan pengelolaan persampahan di Kabupaten Dharmasraya dengan membuat zona-zona yang akan dilayani berdasarkan timbulan sampah, kepadatan penduduk, topografi daerah, serta konsentrasi kegiatan Kabupaten Dharmasraya seperti kegiatan perdagangan, pemerintahan dan perkantoran, pelayanan kegiatan sosial dan pariwisata;
5. Perencanaan pengembangan daerah dan tingkat pelayanan serta target pelaksanaan metode 3R dalam kurun waktu 15 tahun (2017-2031);
6. Perencanaan pengembangan aspek teknis persampahan meliputi:
 - a. Perencanaan jumlah wadah yang dibutuhkan berdasarkan pola wadah yang direncanakan di setiap zona;
 - b. Menentukan perletakan wadah sampah berdasarkan zona-zona pengembangan di jangka pendek perencanaan;

- c. Menentukan pola-pola pengumpulan sampah di Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan zona-zona pengembangan;
 - d. Menentukan rute pengangkutan sampah yang paling efektif berdasarkan jarak dan waktu tempuh di jangka pendek perencanaan;
 - e. Perencanaan pengelolaan berbasis 3R yaitu dengan membangun Tempat Pengolahan Sampah berbasis 3R (TPS 3R) di masing-masing zona pelayanan dengan skala kawasan;
 - f. Perhitungan luas TPS 3R berdasarkan pengolahan apa yang akan dilakukan dari potensi 3R yang ada;
 - g. Pembuatan *layout* TPS 3R; dan
 - h. Perhitungan kebutuhan luas TPA.
7. Perencanaan pengembangan aspek non teknis persampahan meliputi peningkatan aspek kelembagaan, peraturan, pembiayaan dan peran serta masyarakat;
 8. Perencanaan anggaran biaya untuk program jangka pendek yaitu untuk kegiatan 5 tahun pertama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan perencanaan, manfaat perencanaan, ruang lingkup dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori literatur mengenai perencanaan teknis pengelolaan persampahan.

BAB III : GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Berisi tentang tata guna lahan dan sarana prasarana yang ada.

BAB IV : KONDISI EKSISTING SISTEM PERSAMPAHAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA

Berisi tentang permasalahan persampahan yang ada di Kabupaten Dharmasraya meliputi tingkat pelayanan, daerah pelayanan, pewadahan, pengumpulan dan pengangkutan.

BAB V : METODOLOGI PERENCANAAN

Berisi tahapan perencanaan yang dilakukan terkait perencanaan teknis manajemen persampahan.

BAB VI : EVALUASI, IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PERSAMPAHAN DAN KEBUTUHAN PENGEMBANGAN

Berisi tentang uraian mengenai permasalahan pengelolaan persampahan dan upaya yang perlu dikembangkan pada sistem pengelolaan.

BAB VII : RANCANGAN UMUM SISTEM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA

Berisi tentang skenario menyeluruh sistem pengelolaan persampahan Kabupaten Dharmasraya untuk jangka panjang.

BAB VIII : RENCANA TINDAK LANJUT

Berisi tentang rencana detail kegiatan pengelolaan persampahan Kabupaten Dharmasraya dengan menggunakan metode 3R untuk 5 (lima) tahun pertama.

BAB IX : PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dan saran dari perencanaan yang telah diuraikan.

